

WALI KOTA JAYAPURA PROVINSI PAPUA

PERATURAN WALIKOTA JAYAPURA NOMOR 101 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

Menimbang

- : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan perlu dioptimalkan;
 - b. bahwa dalam upaya untuk lebih mengoptimalkan dalam pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta untuk lebih meningkatkan kemudahan pelayanan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

- 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2507);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3533);
- 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;
- 6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2011 Pembentukan tentang Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Penjelasan atas Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
- 11. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2023 Nomor 224);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA
PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Jayapura.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Jayapura.
- 3. Walikota adalah Walikota Jayapura.

- 4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura.
- 5. Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura.
- 6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 8. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- 9. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
- 10.Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan bangunan.
- 11. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya di tingkat PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.
- 12. Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara, yang selanjutnya singkat PPAT/S adalah pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT.

- 13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
- 15. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
- 16. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat SSPD- BPHTB, adalah bukti pembayaran atau penyetoran BPHTB yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
- 17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan yang dikeluarkan Walikota, yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah yang masih harus dibayar.
- 18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- 19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- 20. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- 21. Verifikasi adalah kegiatan yang dilakukan ditempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh BPPD dalam rangka menentukan NPOP yang sebenarnya.

- 22. Bank atau tempat lain yang ditunjuk adalah Bank atau tempat yang ditunjuk oleh Walikota untuk menerima pembayaran BPHTB terutang dari wajib pajak.
- 23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
- 24. Nilai Perolehan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NPOP adalah nilai atau harga yang digunakan untuk menetapkan besaran BPHTB.
- 25. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah

BAB II

TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu

Pengurusan Akta Pemindahan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 2

Wajib pajak mengurus Akta Pemindahan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan melalui PPAT, PPAT/S, Notaris atau Kepala Kantor Lelang sesuai peraturan perundang- undangan.

Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah NPOP.
- (2) NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.

- (3) Bapenda dapat menggunakan perhitungan NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan pendekatan:
 - a. BAPENDA dapat menyusun Pedoman nilai pasar;
 - Pedoman penilaian indikasi rata-rata yang ditetapkan oleh Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk penetapan nilai pasar;
 - c. NJOP sebagai dasar nilai pasar apabila belum terdapat ketetapan penggunaan Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan/atau b;
- (4) Dalam hal terjadi kesenjangan yang signifikan terhadap perhitungan NPOP dari perolehan jual beli oleh Wajib Pajak dengan hasil BAPENDA, pemohon perhitungan maka notifikasi **BPHTB** menandatangani Pernyataan Surat nilai transaksi yang diperhitungkan.
- (5) Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Ketentuan lebih lanjut untuk penggunaan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 4

- (1) BAPENDA menetapkan besaran NPOP Tidak Kena Pajak sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (2) NPOP Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak untuk setiap objek pajak

Bagian Kedua Pemungutan

Pasal 5

- (1) Seluruh proses kegiatan pemungutan BPHTB tidak harus diserahkan atau diborongkan kepada pihak ketiga.
- (2) Pemungutan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara on line.

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak menghitung dan mengisi SSPD BPHTB serta membayar sendiri pajak terutang pada Bank yang ditunjuk.
- (2) Wajib pajak sebelum membayar pajak ke Bank yang ditetapkan oleh Walikota mengajukan nota verifikasi ke BAPENDA untuk dilakukan pemeriksaan atas kelengkapan, keabsahan dan kepatutan atas pembayaran pajak.
- (3) Dalam hal perolehan hak atas tanah atau bangunan berdasarkan hasil pelelangan, Kepala Kantor yang membidangi Lelang menandatangani SSPD BPHTB
- (4) Penyediaan formulir SSPD BPHTB diselenggarakan oleh BAPENDA.
- (5) Format SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga Tata Cara Pembayaran

Pasal 7

- (1) Walikota mendelegasikan wewenang penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, dan STPD kepada Kepala BAPENDA
- (2) Dalam pelaksanaan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAPENDA wajib menyampaikan laporan secara periodik setiap bulan pada awal bulan berikutnya kepada Walikota

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan SSPD BPHTB.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh wajib pajak ke Bank yang tetapkan oleh Walikota.
- (3) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, batas waktu pembayaran jatuh pada hari berikutnya.
- (4) Pembayaran dengan cek Bank/Giro Bilyet Bank, baru dianggap sah apabila telah dilakukan kliring dan tercatat pada Rekening Kas Daerah.
- (5) Wajib Pajak menerima SSPD/bukti lain yang sah sebagai bukti telah melunasi pembayaran pajak dari Bank atau tempat lain yang ditunjuk

Pasal 9

- (1) Setiap pembayaran BPHTB wajib diteliti oleh Kepala BAPENDA atau Pejabat yang membidangi BPHT.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebenaran informasi yang tercantum dalam SSPD BPHTB; dan
 - b. kelengkapan dokumen pendukung SSPD BPHTB
- (3) Jika diperlukan, penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disertai dengan verifikasi
- (4) Bentuk formulir BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan Format Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jayapura.

Ditetapkan di Kota Jayapura
Pada Tanggal 20 Desember 2023
PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA
TTD
FRANS PEKEY

Diundangkan di Jayapura Pada tanggal 20 Desember 2023 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD

ROBBY KEPAS AWI, SE., MM PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19730118 200312 1 003

BERITA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2023 NOMOR 521

n SEKRETA

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

IS DAERAH KOTA JAYAPURA LA BAGIAN HUKUM,

NA DAWIR, SH, MH PEMBINA TK. I

NIP. 19740505 200312 2 0124

LAMPIRAN I : Peraturan Walikota Jayapura

 Nomor :
 101
 2023

 Tanggal:
 20 Desember
 2023

FORMAT SSPD BPHTB Lembaran Pertama (Warna Putih)

	ROTE JAYAPURA		LEHAN H	SP	AT/	BPHTB	DANB			AN	Lembar 1 Untuk Wajib Pajal Sebagai Bukti Pembayaran
	- GHOLLES	BERFI	JNGSI SEBAGA PAJAK BUI	AI SUI MI DA	RAT N BA	PEMBERITAHI ANGUNAN (SP	JAN OBJEK OP PBB)	PAJA	K		Pembayaran
	DAN PENDAPATAN DAER										
PE	RHATIAN : Bacalah petunji	uk pengisian p	ada halaman b	elaka	ing le	embaran ini ter	lebih dahulu.				
Α.	Nama Wajib Pajak :	MARTIN	AUROPKA		-						
- 10	The second secon	911201670			-						
	3. Alamat Wajib Pajak:			MG /	MEN	ON DEDUM D	TN NO A2				-11-1-1
		Abepantai	100111011110	111	W 5V	RT/RW :003	and the second second	Konsi	matan	- Ahani	ira
	7. Kabupaten / Kota :				5 W	Code Pos :	2 / 002 0.1	reccar	1101011	Teanific	1115
_										-	
	 Nomor Objek Pajak (Letak Tanah Dan Ban 		2.71.003.0 L. KOYA KOS		04.0	0670.0					
	3. Kelurahan/Desa		OYA KOSO			-	4. RT/F	W	: 00	0 / 0	0
	5. Distrik		BEPURA				6. Kota			APURA	
	Penghitungan NJOP PBI	3									and the latest l
	Uraian	1	Luas (M2)			NJOP PBB/N	42		L	ids x NJ	OP P68/M2
	Tanah (Bumi)	7.	30,000	M2	9.		14.000,00	11.	-		20.000.000,00
	Bangunan	8.	80	M2	10			12.			96.000.000,00
	15. Jenis Perolehai			-	-		JOP PBB :		-		6.000.000,00
	Perhitungan BPHTB (Ha 1. Nilai Perolehan Obje							4	1.	Rp.	516.000.000,00
_	2. Nilai Perolehan Obje			S\$10.17	1000	TKP)		September 1	2.	Rp.	60.000.000,00
_	3. Nilai Perolehan Obje				_	1. 1	angka 1 - an	TO A LOS I	3.	Rp.	456.000.000,00
	 Bea Perolehan Hak A Bea Perolehan Hak A 		and the second second second	-	Mary property	The second secon	596 x angka	3	4.	Rp.	22.800.000,00
	Jumlah Setoran Berdasa A. Perhitungan Wa B. STPD BPHTB/SI SKPDB KURANG B. C. Pengurangan Di D. 01 Jual Beli JUMLAH YANG DISETOR	njib Pajak KPD KURAN AYAR TAMB ihitung Send	AHAN *) firi menjadi [010	1	nor:				Tanggai	i:
- 1		-			-						
į	Кр. 22,800	.000,00	DUA	PULI	JH E	OUA JUTA DE	LAPAN RA	TUS	UBU	RUPIAN	
IILAV	Jayapura, 08-09-2023 B PAJAK / PENYETOR		NGETAHUI TINOTARIS			DITERIMA TEMPAT PEMBA' Tgl :			чт. Кер	ala Badar	rerifikasi : h Pendapatan Daerah Jayapura
	MARTINA UROPKA	Na Na	omi Alio			•			ADO	DLFINA T	TANIAU, SE,MM
ama	MARTINA UROPKA lengkep den tende tengen		omi Alio stempel den tende	targer	Macro	e lengkap, stempe	I dan tenda tan	gan			ANIAU, SE,MM Impel dan tanda tangan
unya	lengkep den tande tangen dies olien Normon Docks	Nema lengkap, Immen 182,71	-		Macro	e lengkap, stempe	l dan tanda tan	gan	Noma 1	ingksp, sti	impel dan tende tangan
anya	langkep den tanda tangan	Nema lengkap, Immen 182,71	stemps! den tenda		Marry	e lengkap, stempe	l dan tanda tan	gan	Noma 1	ingksp, sti	

Tampak Depan

PETUNJUK PENGISIAN SSPD

- tu SSPD untuk setiap setoran dan setiap jenis perolehan hak atau sualu tanah dan atau bangunan,
- Formulir ini dapat juga digunakan untuk pembayaran atas suatu pembelulan suatu pengumkapan ketidakbenaran penghitungan WP.

Angka 1 Dissi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) yang tercantum dalam SPPT PBB atas tanah dan atau bangunan yang bersangkutan.

Angka 2 s.d. angka 6 Disi dengan lelak tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh.

U.O. O.D. s. O.

Angka 14. Diisi dengan harga transaksi yang terjadi / harga transaksi yang tercantum dalam Risalah Lelang / nilai-nilai pasar objek tersebut.

Jenis Perolehan Hak	Kode	Jenis Perolehan Hak	Kode	Jenis Perolehan Hak	Kode
Pemindahan Hak:	1.5	Pemasukan dalam persercan/badan hukum lainnya	06	- Pemekaran Usaha	12
* Jusi beti	01	Pemisahan hak yang mengakibatkan pemisahan	07	- Hadiah	13
* Tukar Menukar	02	Penunjukan pembeli dalam lelang	08	- Pemberian Hak Bari	160
*Hibah	03	- Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap	09	- Pemberian Hak Baru Sebagai Kelanjutan Pelepasan Hak	14
* Hibah Wasiat	04	- Penggabungan Usaha	10	- Pemberian Hak Baru Pelepasan Hak	15
*Waris	05	- Peleburan Usaha	11		

gurundunga serutinas sarutin. Bungan Bes Perdiehan Hak atas tanah dan Bangunan (PBHTB) oleh WPNIN 1020 + 2 10 1022 1000 1011 1020 1011 1020

Dalam hal SSPD digunakan untuk setoran berdasarkan STB/SKBKB/SKBKBT sebagaimana huruf Db atau berdasarkan huruf Dd. Huruf C tidak perlu diisi.

Angka 3 Cukup Jelas.

Angka 5 Disi Sama dengan angka 5, dalam hal WP memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan karena waris / hibah wasiat/ pemberian hak pengelo Sama dengan angka 4, dalam hal WP memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan karena waris / hibah wasiat/ pemberi hak pengelo Sebagaimana dimaksud pada angka 5.

Huruf a. Menurut perhibungan WP sebagaimana huruf C.

Menurut Surat Tagham Bea Perolehan Hatk-Atas Tanah dan Bangunan (STB), atau

Huruf b.

Menurut Surat Kelstapan Bea Perolehan Hatk-Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB) atau

Menurut Surat Kelstapan Bea Perolehan Hatk-Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT).

Huruf c. Dia delam hal WP menghitung serdiri besamya pengurangan BPHTB yang terutang karena:

Huruf d.

Diasi untuk setoran selain buruf a, huruf b, seperti setoran berdasarkan SK pembelulan / SK Keberatan / Putusan Banding / Putusan lain yang Menyebabkan jum pejisk yang harus dibayar bertambah.

*Disi dengan kumlah pajak yang disetor dengan angka (dalam kotak) dan huruf (pada bagian yang diasir)

- SSPD nihit cultup diketahul oleh PPAT / Notaris / Kepala Kantor Lefang / Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota dengan menandatangani kolom yang telah Disadiakan (WP tidak pertuka Banki / Kantor Pos Persepsi).

Tampak Belakang (Petunjuk Pengisian SSPD BPHTB)

Diperuntukkan Kepada

Lembaran Kedua (Warna Merah Muda)

PAJAK BUMA PENDAPATAN DAERAH KOTA JAYAPURA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA JAYAPURA PERHATIAN - Bacalah pelinjuk pengisian pada halaman belakang lembaran ini terlebih dahulu. A. I. Nama Wajib Pajak MARTI NA UROPKA 2. Na IK SILIZUE/DODROKOL 2. Alamat Wajib Pajak MARTI NA UROPKA 2. Na IK SILIZUE/DODROKOL 3. Alamat Wajib Pajak MARTI NA UROPKA 4. Kotarahan/Dosa Abrahama 4. Kotarahan/Dosa Abrahama 5. Kotarahan/Dosa Abrahama 6. Kotarahama 6. Kotarahan/Dosa Abrahama 6. Kotarahama 6. Ko			OLEHAN H	SPI AI SURA	D-BPHTE	H DAN E	ANGU	NAN	Lembar 2 Untuk Badan Pendapatan Daeral Melalui Bank
PERHATIAN: Bacatah pelunjuk pengisian pada halaman belakang tembaran ini terlebih dahulu. A. I. Nama Wojib Pigisi: M. MARCITNA UROPKA 2. N.I K. 91.2016/00090001 3. Alamas Wajib Pigisi: R. MANGGA DUN KANPUNS AMBONI PERUM BITN NO A2 4. Kekurahan/Desa Abepartal 48. RY/RW 003 / 003 6. Kecamatam -Abepara 7. Kabupateni / Rota - Jayapura 89. Kode Pors 1 8. I. Norro Pigisi (NOP) - 18.271.003.009.009.009.70.0 2. Lesak Tanah Dan Bangurasai - J.I. KOWA KOSO 3. Kedurahan/Desa KOYA KOSO 4. KT/RW 000 / 00 5. Pagisis 1. Lesak Tanah Dan Bangurasai - J.I. KOWA KOSO 4. KT/RW 000 / 00 5. Pagisis 1. Lesak Tanah Dan Bangurasai - J.I. KOWA KOSO 4. KT/RW 000 / 00 5. Pagisis 1. Lesak Tanah Dan Bangurasai - J.I. KOWA KOSO 4. KT/RW 000 / 00 5. Pagisis 1. Lesak Tanah Dan Bangurasai - J.I. KOWA KOSO 4. KT/RW 000 / 00 6. Kola - JAYAPUNA 7. JAO 000 / A2 J. P. J. ROCOCO I.I. RD 440000000, 00 7. Randurasai Iliani - J.				MI DAN	BANGUNAN (S	POP PBB)		SHEET	
A. 1. Name Weijb Perjek MARTINA UROPKA 2. N. 1 K 2. Alleres Weijb Perjek MARTINA UROPKA 2. Alleres Weijb Perjek MARTINA UROPKA 2. Alleres Weijb Perjek MARTINA UROPKA 2. Kokursher/Dodo Abpartal 3. Kokursher/Dodo Abpartal 4. Kota Angeria 8. Kode Prog. 2. Kokursher/Dodo Abpartal 8. Kode Prog. 3. Koluration (Note: Navapura) 8. Kode Prog. 3. Koluration (Note: Navapura) 8. Kode Prog. 4. Kritani Den Benguran) 5. Letter (Note: Note:				halakan	a lambaran ini te	elobib dabulu			
2. NEW POOL POOL OO DO	PERHATIAN : Bacalah	petunjuk pengisiai	n pada naiaman	Detakan	g tembaran ini te	eriebin danulu	k		
2. NEW POOL POOL OO DO		MADYIN	IA LIBORYA						
2. Allamas Wajib Pejilis X, MANGGA DUN YAMPUNG AMBORI PORUM BTN NO A2 1. Kofursham/Doso Abopartai — B. RT/RW 1007 (200 6. Reconstan - Abepara 7. Kabupaten / Kota - Bayapura B. Kora Koso 2. Letta Tarah Dan Bangunan , Ji, Kora Koso 3. Kelaraham/Doso Kora Rengunan , Ji, Kora Koso 3. Kelaraham/Doso Kora Rengunan , Ji, Kora Koso 4. RT/RW - 000 / 00 3. Kelaraham/Doso Kora - Bayapura Roberta - Bayapura -									
## Kcfurahan/Doss									
R. I. Nomor Organi Pattat (NOP) : 82.71.003.009.004.0670.0 2. Letak Tanah Dan Bergaman : JL. KOVA KOSO									
R. Nomor Dopin Papini (NOP) : B2.71.003.009.004.0670.0 2. Lettals Troigh Dan Bergunan ; JL. KOWA KOSO 4 BTANAY - 000 F 00 5. Destria - ABEPURA 0. Kota 13AYAPURA Penglisungan (ACR) P38 Ulanos									
2. Lectal Tanah Dan Bengunan JL. KOYA KOSD 4 MT/RW : 000 / 00 3. Febrahampess KOYA KOSD 4 MT/RW : 000 / 00 5. Destrik : ABEPURA 0. Kota JAYAPURA Petiglitumgan (CUCP PEd) Ulanar : Lues (MZ)									
S. Emiting S. Emiting S. ABECPURA O. Kola Distribution Distribution Lucis (PLd.) AUCIP PBB/PM2 Lucis TUCIP PBB/PM2 Tanah (Burni) 7. 30.000 M2 9. 14.000,00 U1 Rp. 420.000.000,00 U2 Rp. 420.000.000,00 U3 Rp. 420.0000.000,00 U3 Rp. 420.0000.0000,00 U3 Rp. 420.0000.000,00 U3 Rp. 420.0000.000,00 U3 Rp. 420.0000.000									
Penglinungan FCCH PER Ulintari Lues (MZ) RUCH PROPRE Lues X PUCH PROPRE Tanah (Burni) 7. 30.000 MZ 9. 14.000,000 LL RD. 420.000.000,000 Bangunan B. 80 MZ JC L200.000,000 LL RD. 90.000.000,000 15. Jenis Perolehan riak Atas Tanah dan Bangunan 01 NICH PER LL RD. \$16.000.000,000 14. Harga Transaksi / Nijei Pasar Noritor Sertifikat / Nije SU/001.59/KOVA KC/SU/2023 Perhitungan PPHTB (Homya diris berdaparken penghitungan wajib pojak) Ria Perolehan Cojek Pajak in MPOP memberhanikan misi pada 6. LF dan 6. PV L RD. \$16.000.000,000 1. Nijei Perolehan Cojek Pajak Kena Pajak INPOPRO) Antia Perolehan Cojek Pajak Kena Pajak INPOPRO) Antia Perolehan Cojek Pajak Kena Pajak INPOPRO) Ber Perolehan Pisik Alas Ianah dan Bangunan yang lei hulang Sanasa Jengah 2. Ria 456.000.000,000 Ber Perolehan Pisik Alas Ianah dan Bangunan yang lei hulang Sanasata Jengah Sanasata Jengah Sanasata Sanasat			KOYA KOSO						
Unioni Lines (PE) ROOP PROPE Lines ROLL PROVIDE Lines ROLL PROVIDE Tanan (Burni) 7 30.000 NZ 9 14.000,00 11 RD 40.000.000,00 Bandunan 8 8 80 NZ 90 12 0 1.200.600,00 12 RD 90.000.000,00 13 RD 90.000.000,00 14 RD 1200.000.000,00 15 RD 90.000.000,00 15 RD 90.000.000,00 14 RD 90.000.000,00 15 RD 90.000.000,00 RD 90.000.000.000,00 RD 90.000.000,00 RD 90.000.000.000.0000,00 RD 90.000.0000,00 RD 90.000.0000,00 RD 90.0000,00 RD 90.0000,00 RD 90.0000,00 RD 90									
Tanah (Bumir) 7 30.000 M2 9 14.000,000 11 Rp 42.0000,000,00 Bangunam 8 90 M2 10 1.200.000,00 12 Rp 96.000.000,00 15. Jerus Perolehan Haix Atas Tanah dan Bangunian 01 NJOP P68 113 Rp 516.000.000,00 Norpor Sertifikat / NiB SU/00139/KOYA KOSO/2023 Perhitungan 8FHTB (Harron dies bordsparten perightungan wajib pojak) 1, Nilai Perolehan Cojes Pajak i NPOP memperhankan misir pada 6.13 dan 6.14 Rp 516.000.000,00 2 NBul Purolehan Cojes Pajak i NPOP memperhankan misir pada 6.13 dan 6.14 Rp 516.000.000,00 3 Bee Perolehan Pojek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) Anna 1 mpa 2 3 Ro 456.000.000,00 5 Bee Perolehan Pajak Kana Fanah dan Bangunan yang lei hutang 350 rangto 3 Rp 22.800.000,00 busuah Setroran Bertaksarkan A Perhitungan Wajib Pajak B STRO BRATTE/SKOD KURANC BAYAR / SURDIG BAYAR / SURDIG KURANC BAYAR / SURDIG BAYAR / SUR									
Tanali (Burni) 7. 30.000 M2 9. 14.000,00 11 RD 4:0.000.000,00 Bangunan U - 80 M2 30. 1.200.600,00 12 RD 96.000.000,00 15. Jens Percienan Hax Attas Tanah dan Bangunan 01 NJOP PBB 13 RD 516.000.000,00 14. Harga Transaksi / Njiai Pasari Rp. 190.000.000,00 14. Harga Transaksi / Njiai Pasari Rp. 190.000.000,00 Northor Sertificat / NiB SU/00139/KUYA KUSU/023 Perhitungan EPHTB (Harnu dirai berdasarkan penghitungan wajib pajak) Rp. 190.000.000,00 Rp. 1. Niiai Perciehan Cujek Pajak (NPOP memperhatokan miai pada 6 . L3 dan 8 Jel Pp. 516.000.000,00 2 Niiai Perciehan Cujek Pajak (NPOP memperhatokan miai pada 6 . L3 dan 8 Jel Pp. 516.000.000,00 2 Niiai Perciehan Cujek Pajak (NPOPR) Anala Perciehan Cujek Pajak (NPOPR) Anala Perciehan Cujek Pajak (NPOPR) Anala Perciehan Niiai Atta Tanah dan Bangunan yang lahutanji Sala asata 3 Rp. 2000.000,00 humain Setoran Rentesarkan Rangunan yang Harus Dibayar 5 Rp. 22.800.000,00 humain Setoran Rentesarkan Pajak (STPO BENTIFISHSO) KUMANC RAYAN / SURBAR RAYAN / SURBA									
Bangunan 8 50 MZ 30. 1.200.600,00 12. Rp. 96.123. Rp. 96.123. Rp. 516.000.000,00 15. Jenis Perolehan Haik Atas Tanah dan Bangunan 01. NUCIP PGB : 1.3. Rp. 516.000.000,00 14. Harga Transaksi / Nijai Pasar Rp. 140.000.000,00 Norpor Sertifikat / NiB SU/00139/KOYA KOSO/2023 Perhitungan BPHTB (Horwa dira) berdasarkan penghitungan wajib pajak) 1. Nijai Perpiehan Cipiek Pajak (NPOP menjaerhadkan masi pada 8. /3 dan 8. /9 1. Rp. 516.000.000,00 2. Nilai Perolehan Cipiek Pajak (NPOP menjaerhadkan masi pada 8. /3 dan 8. /9 1. Rp. 516.000.000,00 2. Nilai Perolehan Haik Atas Tanah dan Bangunan yang lei lutang 20. angsa 3. angsa 3. Rp. 456.000.000 on 4. Bese Perolehan Haik Atas Tanah dan Bangunan yang lei lutang 20. angsa 3. Rp. 22.800.000,00 2. Bese Perolehan Haik Atas Tanah dan Bangunan yang lei lutang 20. angsa 3. Rp. 22.800.000,00 2. humlah Setoran Reinbergan Haik Atas Tanah dan Bangunan yang lei lutang 20. angsa 3. Rp. 22.800.000,00 2. humlah Setoran Berdasarkan 22.700,000,00 20. humlah Setoran Berdasarkan 22.700,000,00 20. humlah Setoran Berdasarkan Daharan Bangunan yang Hans Dibayar 5. Rp. 22.800.000,00 22. Rp. 22.800.000,00 22. Rp. 22.800.000,00 23. Rp. 22.800.000,00 24. humlah Setoran Berdasarkan Daharan Berdasarkan Daharan Berdasarkan Daharan Berdasarkan Daharan Bangunan Dibatung Senditi menjadi [0] 0 20. Daharan Berdasarkan Daharan Bangunan Dibatung Senditi menjadi [0] 0 20. Daharan Berdasarkan Daharan Bangunan Bangunan Daharan Bangunan Bangunan Daharan Ban									
15. Jenis Perolenan Haik Atas Tanah dan Bangunan 01 NJOP P68 : 1.5 RD S16.000.000,00 14. Harga Transabsi / Nijai Pasar: Rp. 140.000.000,00 Nozipor Sertifikat / Nija SU/OCIJS/KOVA KOSOV/2023 Perhitungan BPHTB (Himma direi berdeserken penghtungan wajib pojak) 1. Nijai Perolehan Objek Pajak (NPOP memberhadkan miar pada 8. 13 dan 8, 14 L. Rp. 516.000,000,00 2. Nijai Perolehan Objek Pajak (NPOPR) memberhadkan miar pada 8. 13 dan 8, 14 L. Rp. 516.000,000,00 3. Bise Perolehan Objek Pajak (NPOPR) memberhadkan yang terhutang 200 asas 2 3, Rp. 456.000,000,00 4. Bise Perolehan Haik Atas Tanah dan Bangunan yang terhutang 200 asas 3 4, Rp. 456.000,000,00 5. Bise Perolehan Haik Atas Tanah dan Bangunan yang terhutang 200 asas 3 4, Rp. 456.000,000,00 humlah Setrizan Bardaserkan A. Pernitungan Wasib Pajak E. STPO BPHTR/SRPO KURANC BAYAR (ANDREW) D. GT Juah Bes JUNUAN YARKS DISETUR (dengan angka) Dangan Huruf PU. 22.800,000,00 DUA PULUN DUA JUTA DELAPAN RATUS RIBU RUPZAN PROMINIA NEGATIFIAN PROMINIA BARAN PROMINIA NEGATIFIAN PROMINIA NEGATIFIAN PROMINIA NEGATIFIAN PRIMAYANAN REPTIR PRANTANAN									
Notifior Sertificat / NiB SU/00139/KCVA KOSU/2023 Perhitungan EPHTB (Harvya dies berdesarken penghitungan vorjib pojalk) I. Nilai Pergiehan Qurek, Pajak i NPOP memberhadkan miki pada 8. L3 dan 8. F4 L Pp. \$18,000,000,000 2. Nilai Pergiehan Qurek, Pajak i NPOP memberhadkan miki pada 8. L3 dan 8. F4 L Pp. \$18,000,000,000 2. Nilai Pergiehan Diripik Pulak Talah Kana Pajak (NPOPKP.) 3. Milai Perdehan Diripik Pajak Kena Pajak (NPOPKP.) 4. Bee Permitungan Piak Kana Tanah dan Bangunan yang letinulang Para septa 3. R0. 456,000,000,000 5. Bee Permitungan Hak Kana Tanah dan Bangunan yang letinulang Para septa 3. R0. 456,000,000,000 6. Bee Permitungan Walib Pajak 8. STPD BENTRIPSOD KURANG BAYAR / SURBA BARANG BAYAR / SURBA BARANG BAYAR TAMBAKAN / NUMBER PAJAK BAYAR									
A. Bee Pennishan hak Alas Fanah dan Bangunan yang Harus Dibayar E. Bee Pennishan Hak Atte Tanah dan Bangunan yang Harus Dibayar humiah Setrutan Rendasarkan A. Pennishan Katasarkan A. Pennishan Vanib Pajak B. STPD BPHTRJEKOD KUMANG BAYAR / Skinor: Tanggal C. Pengunangan Dibiting Sendin menjadi 0 0 D. OT Jual Bei JUALAN YANG DISETUR (dengan angka) Dua PULUN DUA JUTA DELAPAN RATUS RIBU KUPIAN AND JUALAN PENNISHAN BERTE TEMPAT PENNISHAN BERTE									
HARTONIA OF THE ACTION OF THE PROPERTY OF THE									
HATTHIS OFFICE AND REPORTED TO THE PROPERTY OF									
D. OT Juid Beil JUNUARY YARG DISETUR (dengen engen) DUNUARY YARG DISETUR (dengen engen) DUNUARY YARG DISETUR (dengen engen) DUNAPULUN DUA JUTA DELAPAN RATUS RIBU RUPLAN PRANCES CONTROL PRINCE CAPIA INDIRAT PRINCE CAPIA INDIRATE PRINCE CAPIA INDIRAT									
JUMIAN YARG DISETUR (dengan angka) Dun Pullun dua Juta delapan riatus ribu suplan Pila 22.600.000,00 Dua Pullun dua Juta delapan riatus ribu suplan Pila 22.600.000,00 Dua Pullun dua Juta delapan riatus ribu suplan Inmat prina delapan Inmat prina prina delapan Inmat prina delapan India delapan In									
PARTIES OF THE PROPERTY OF THE									
PARTIES OF THE PROPERTY OF THE									
HISTORY DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PRO	HJA. 2				DUA JUTA DI	ELAPAN RA			
BADAN PENDANAN BIFTED BADAN PENDAN BIFTED BADAN BIFTED BADAN PENDAN BIFTED BADAN									
		SER!	N TA WATER						

Diperuntukkan Kepada

Lembaran Kedua (Warna Merah Muda)

	The state of the s	BERF	UNGSI SEBAG PAJAK BU	SSP AI SUF	D-	N PAJAK DAERAH AS TANAH DAN B BPHTB) PEMBERITAHUAN OBJEK NGUNAN (SPOP PBB)		NAN	Lembar 3 Untuk Badan Pendapatan Daerah Disampaikan Oleh Wajib Pajak
	AN PENDAPATAN DAERA	The state of the s						THE REAL PROPERTY.	
PER	HATIAN : Bacalah petunjuk	pengisian	pada halaman	belaka	ng lei	mbaran ini terlebih dahulu.			
	The state of the s	MARTIN	A UROPK	1					
			03890001						
			V DRV KVWb	V ENU	MBO	ON PERUM BTN NO AZ			
		bepantal			R	T/RW :003 / 003 6. I	Cecamat	an Aben	
	/ Kabupaten / Kota	ayapura			B. K	ode Pos			
B: 1	Nomor Objek Pajak (N	OP)	82.71.003.0	0.00	04.0	0670.0			
	Letak Tanah Dan Bang		IL KOYA KO	SO					
	Kelurahan/Desa		KOYA KOSO			4. RT/R		000 / (00
	engintungan NJOP F66		ABEFURA			ő. Kola	1.39	YAPURA	
- 1	Uraidii								
		7.1	Luas (MZ)			NUOP PBB/MZ			ICH HBB/M2
1	Tanah (Bumi) Bangunan	10	30.000	MZ			II Rp.		20.000.000,00
1		8.	80	IMZ		1.200.000,00			98.000.000,00
	15. Jenis Perotenan	Hak Atas	ranan dan B		an o	1 NJOP PBB :	13. Rp.		16.000.000,00
1	Nornor Seruñkat / NIB S	U/00139/				Transalsii / Nilei Pasar:			40.000.000,00
1	erhitungan BPHTB (Han	ya diisi be	rdasarkan pe	nghitu	ngar	wajib pajak)		Rp.	
						iai pada B. 13 dan B. 1-	1	Ro.	
	Nilai Perolehan Objek Nilai Perolehan Objek	Parak Ker	us Rund Paja na Patak / NE	ODED	OPT	KI) angsa 3 - an	oka 2 3.	Rp	456,000,000,00
4									456.000.000,000 44.5000.000,000
5	Bea Perolehan Hali At						19	Pp.	22.800.000,00
	A. Ferhitungan Waji B. STPO BPHTB/SKI SKPOB KURANG BA C. Pengurangan Dih	b Pajak PD KURAN VAR TAME	MHAN 13	00	Nam			Tangga	4:
	MILAN YANG DISETOR (dengan a	igka) Deng	an Hu	ut				
	μ. 22.800.0	000,00	DUA	PULL	нр	UA JUTA DELAPAN RAT	US RIB	U RUPIAI	4
	RYADUTA, DE-D9-2023 PAJAK / PEMYETOR	a a a	BADAN PATAN DAERAH			OTTENINA OLEH EMPAT PEMBAYARAN BIHTB Tol :	ME. K	mpain tanda	verifikasi n Pendapatan Disersis Javagura
			Iomi.who				A	DOLFINA	TANIAU, SE,MM
	PLAKTINA UKOPKA								
	nghap dan terde tengan		element dan bands			Angloss, steeped dies beschilberg			
MINN S		nen legten. nen 182.71	element dan bands			hoglass, steeped day taxda taxq			

Diperuntukkan Kepada

Lembaran Ketiga (Warna Kuning)

KOTE JAYAPURA	SURAT SETORAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANA (SSPD-BPHTE	H DAN BAN	GUNAN	Lembar 4 Untuk Tempat Pembayaran BPHTE
The same of the sa	BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SI		AK	(Bank Papua)
BADAN PENDAPATA	N DAERAH KOTA JAYAPURA	1 01 1 00/	THE REAL PROPERTY.	
	n petunjuk pengisian pada halaman belakang lembaran ini te	erlebih dahulu.		
	MARTINA UROPKA			
	MENA KENCE			
		of shall Co. E.V.	12 - RD	
To be seen				
		PSANT INTEREST		
	BADAN SEIDENMORENM			
		2.2		

Diperuntukkan Kepada

Lembaran Keempat (Warna Hijau)



Diperuntukkan Kepada

Lembaran Kelima (Warna Biru Muda)

PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA TTD FRANS PEKEY

Diundangkan di Jayapura Pada tanggal 20 Desember 2023 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD

ROBBY KEPAS AWI, SE., MM PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19730118 200312 1 003

BERITA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2023 NOMOR 521

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

RIS DAERAH KOTA JAYAPURA AA BAGIAN HUKUM,

У∤ PEMBINA TK. I 10740505 200212 2 0124

NIP. 19740505 200312 2 0124

LAMPIRAN II: Peraturan Walikota Jayapura

Nomor: 101 Tahun 2023 Tanggal: 20 Desember 2023

FORMULIR TRANSAKSI BPHTB ALAT VALIDASI DATA PENJUAL DAN PEMBELI BPHTB

養 自自 發	DIN	FORM ADMINISTRASI TRANSAK NAS PENDAPATAN DAERAH KOT		Lembar 1
The same water		BERFUNGSI SEBAGAI ALAT V. DATA PENJUAL DAN PEMBELI		Untuk Dispenda
Data Penjual / Pemb				
A. Nama Penjual / Pe	emberi :			
Jenis Kelamin				
Tempat Tgl / Lahir	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-	
Status Pekerjaan	-			
Jenis Pekerjaan	-		-	
Alamat			- Rt / Rw :	
Blok / Kav / No Kota	-		Kode Pos	
Kecamatan			Kelurahan :	
Nama Ibu Kandun			_ Rejurarian .	
Handphone	9		No. Telepon :	
E mail	-		_ 140. 16160011 .	
NPWP	-		-	
No. Identitas			-	
Keterangar	54		-	
Data Pembeli / Pene				
Jenis Kelamin Tempat Tgl / Lahir Status Pekerjaan	enerima :			
3. Nama Pembeli / Po Jenis Kelamin Tempat Tgl / Lahir Status Pekerjaan Jenis Pekerjaan	enerima :			
3. Nama Pembeli / Po Jenis Kelamin Tempat Tgl / Lahir Status Pekerjaan Jenis Pekerjaan Alamat	enerima :	0		
3. Nama Pembeli / Po Jenis Kelamin Tempat Tgl / Lahir Status Pekerjaan Jenis Pekerjaan	enerima :		Rt / Rw :	
3. Nama Pembeli / Po Jenis Kelamin Tempat Tgl / Lahir Status Pekerjaan Jenis Pekerjaan Alamat Blok / Kav / No	enerima :			
3. Nama Pembeli / Punis Kelamin Tempat Tgl / Lahir Status Pekerjaan Jenis Pekerjaan Alamat Blok / Kav / No Kota	enerima		Kode Pos :	
3. Nama Pembeli / Po Jenis Kelamin Tempat Tgl / Lahir Status Pekerjaan Jenis Pekerjaan Alamat Blok / Kav / No Kota Kecamatan	enerima		Kode Pos :	
3. Nama Pembeli / Pi Jenis Kelamin Tempat Tgl / Lahir Status Pekerjaan Jenis Pekerjaan Alamat Blok / Kav / No Kota Kecamatan Nama Ibu Kandung	enerima		Kode Pos : Kelurahan :	
3. Nama Pembeli / Po Jenis Kelamin Tempat Tgl / Lahir Status Pekerjaan Jenis Pekerjaan Alamat Blok / Kav / No Kota Kecamatan Nama Ibu Kandung Handphone	enerima		Kode Pos : Kelurahan :	
3. Nama Pembeli / Po Jenis Kelamin Tempat Tgl / Lahir Status Pekerjaan Jenis Pekerjaan Alamat Blok / Kav / No Kota Kecamatan Nama Ibu Kandung Handphone E mail	enerima		Kode Pos : Kelurahan :	
3. Nama Pembeli / Pura Jenis Kelamin Tempat Tgl / Lahir Status Pekerjaan Jenis Pekerjaan Alamat Blok / Kav / No Kota Kecamatan Nama Ibu Kandung Handphone E mail NPWP	enerima		Kode Pos : Kelurahan :	
3. Nama Pembeli / Po Jenis Kelamin Tempat Tgl / Lahir Status Pekerjaan Jenis Pekerjaan Alamat Blok / Kav / No Kota Kecamatan Nama Ibu Kandung Handphone E mail NPWP	enerima	NOTARIS / PPAT	Kode Pos : Kelurahan : No. Telepon :	DAPATAN DAERAH
3. Nama Pembeli / Pudenis Kelamin Tempat Tgl / Lahir Status Pekerjaan Jenis Pekerjaan Alamat Blok / Kav / No Kota Kecamatan Nama Ibu Kandung Handphone E mail NPWP No. Identitas Keterangan	enerima	NOTARIS / PPAT	Kode Pos : Kelurahan : No. Telepon :	DAPATAN DAERAH A JAYAPURA

PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA TTD FRANS PEKEY

Diundangkan di Jayapura Pada tanggal 20 Desember 2023 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

> ROBBY KEPAS AWI, SE., MM PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19730118 200312 1 003

TTD

BERITA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2023 NOMOR 521

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a a SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA KEPALA BAGIAN HUKUM,

> FEMBINA TK. I 9740505 200312 2 0124

LAMPIRAN III : Peraturan Walikota Jayapura

Nomor: 101 Tahun 2023 Tanggal: 20 Desember 2023

FORMULIR BERKAITAN DENGAN BPHTB

Yang bertanda tangan di	nawah ini :	
Nama Lengkap	1	
Alamat	4.	
No. E - KTP	_	
Pekerjaan	+	
rendjadii		
Menyatakan bahwa telal	terjadi Transaksi Jual Beli sebidang Tanah dar	n/atau Bangunan
seharga <i>Rp.</i>	yang beralamat di :	
Jalan	*	
Distrik	: Kota : <u>J</u>	avapura
Kelurahan	: RT/RW :	/
Keluranan		
Nomor Sertifikat	LT/LBansaksi tersebut diatas tidak sesuai dengan harg	
Nomor Sertifikat Apabila dikemudian hari sebenarnya, maka saya t	ET/LB	ga transaksi yang
Nomor Sertifikat Apabila dikemudian hari l sebenarnya, maka saya t Demikian surat pernyata:	ansaksi tersebut diatas tidak sesuai dengan harg rrsedia mempertanggungjawabkan, n ini saya buat dengan sebenar – benarnya tai	ga transaksi yang npa ada tekanan
Nomor Sertifikat Apabila dikemudian hari l sebenarnya, maka saya t Demikian surat pernyata:	ansaksi tersebut diatas tidak sesuai dengan harg risedia mempertanggungjawabkan, n ini saya buat dengan sebenar – benarnya tar Jayapura,	ga transaksi yang
Nomor Sertifikat Apabila dikemudian hari l sebenarnya, maka saya b Demikian surat pernyata	ansaksi tersebut diatas tidak sesuai dengan harg risedia mempertanggungjawabkan, n ini saya buat dengan sebenar – benarnya tar Jayapura,	ga transaksi yang npa ada tekanan / /2018
Nomor Sertifikat Apabila dikemudian hari l sebenarnya, maka saya t Demikian surat pernyata:	ansaksi tersebut diatas tidak sesuai dengan harg risedia mempertanggungjawabkan, n ini saya buat dengan sebenar – benarnya tar Jayapura,	ga transaksi yang npa ada tekanan / /2018
Nomor Sertifikat Apabila dikemudian hari l sebenarnya, maka saya b Demikian surat pernyata	ansaksi tersebut diatas tidak sesuai dengan hargirsedia mempertanggungjawabkan. n ini saya buat dengan sebenar — benarnya tai Jayapura, Yang Mem	ga transaksi yang npa ada tekanan / /2018
Nomor Sertifikat Apabila dikemudian hari l sebenarnya, maka saya t Demikian surat pernyata:	ansaksi tersebut diatas tidak sesuai dengan hargirsedia mempertanggungjawabkan. n ini saya buat dengan sebenar — benarnya tai Jayapura, Yang Mem	ga transaksi yang npa ada tekanan / /2018
Nomor Sertifikat Apabila dikemudian hari tesebenarnya, maka saya tesebenarnya	ansaksi tersebut diatas tidak sesuai dengan hargirsedia mempertanggungjawabkan. n ini saya buat dengan sebenar — benarnya tai Jayapura, Yang Mem	ga transaksi yang npa ada tekanan / /2018
Nomor Sertifikat Apabila dikemudian hari tesebenarnya, maka saya tesebenarnya	ansaksi tersebut diatas tidak sesuai dengan hargarsedia mempertanggungjawabkan. n ini saya buat dengan sebenar – benarnya tar Jayapura, Yang Mem MATERAI 6000	ga transaksi yang npa ada tekanan / /2018
Nomor Sertifikat Apabila dikemudian hari tesebenarnya, maka saya tesebenarnya	ansaksi tersebut diatas tidak sesuai dengan hargarsedia mempertanggungjawabkan. n ini saya buat dengan sebenar – benarnya tar Jayapura, Yang Mem MATERAI 6000	ga transaksi yang npa ada tekanan / /2018

2023.12.0137				
2023.12.0137		Nomor Pelayanan	2023.12.0	137
		Tanggal Pelayanan Tgl. Selesai (perkiraan)	19-12-2023 19-12-2023	
Jenis Pelayanan	Jual Bell			
NOP	82.71.003.006.024.012	8-0		
Lampiran data penjual - Menggunakan stopmap 1 Kontrol Berkas	menggunakan materai 6000 pembeli lembar 1 berkas	PC ONO 7 A 12 Fc SPPT PBB Tahun Be Fe Kwintansi Jual - bel Lampiran Surat Peryat No. tlp / hp pembeli	Bermateral 6000 aan	s PBB
Pemberkasan / Registrasi	Survey Lapangan	Penginputan dan Penerbitan	(Pengesahan)	Kepala Bidang (Pengesahan)
PELAYANAN Formulir Pelay BADAN PENDA	yanan Wajib Pajak BPHTE APATAN DAERAH KOTA JA	Penerbitan potong disini		
PELAYANAN Formulir Pelay BADAN PEND/ JI. Kabupaten I	yanan Wajib Pajak BPHTE	Penerbitan potong disini	(Pengesahan)	(Pengesahan)
PELAYANAN Formulir Pelay BADAN PENDA	yanan Wajib Pajak BPHTE APATAN DAERAH KOTA JA	Penerbitan potong disini AYAPURA Nomor Pelayanan Tanggal Pelayanan	2023.12.0 19-12-2023	(Pengesahan)
PELAYANAN Formulir Pelay BADAN PEND JI. Kabupaten II 2023.12.0137	yanan Wajib Pajak BPHTE APATAN DAERAH KOTA JA II No. 2 APO - JAYAPURA	potong disini AYAPURA Nomor Pelayanan	(Pengesahan)	(Pengesahan)
PELAYANAN Formulir Pelay BADAN PEND JI. Kabupaten II 2023.12.0137 Jenis Pelayanan	yanan Wajib Pajak BPHTE APATAN DAERAH KOTA J II No. 2 APO - JAYAPURA Jual Beli	potong disini AYAPURA Nomor Pelayanan Tanggal Pelayanan Tgl. Selesai (perkiraan)	2023.12.0 19-12-2023	(Pengesahan)
PELAYANAN Formulir Pelay BADAN PEND JI. Kabupaten II 2023.12.0137 Jenis Pelayanan NOP	yanan Wajib Pajak BPHTE APATAN DAERAH KOTA J II No. 2 APO - JAYAPURA Juel Bell 82.71.003.006.024.01	Penerbitan potong disini AYAPURA Nomor Pelayanan Tanggal Pelayanan Tgl. Selesai (perkiraan)	2023.12.0 19-12-2023	(Pengesahan)
PELAYANAN Formulir Pelay BADAN PENDI JI. Kabupaten II 2023.12.0137 Jenis Pelayanan NOP Nama Pemohon	yanan Wajib Pajak BPHTE APATAN DAERAH KOTA Ji II No. 2 APO - JAYAPURA Jual Beli 82.71.003.006.024.01: NUR AYU F. KASTEL	potong disini AYAPURA Nomor Pelayanan Tanggal Pelayanan Tgl. Selesai (perkiraan)	2023.12.0 19-12-2023	(Pengesahan)
PELAYANAN Formulir Pelay BADAN PEND/ JI. Kabupaten II 2023.12.0137 Jenis Pelayanan NOP Nama Pemohon Alamat Pemohon	yanan Wajib Pajak BPHTE APATAN DAERAH KOTA JI II No. 2 APO - JAYAPURA Jual Beli 82.71.003.006.024.01: NUR AYU F. KASTEL PURI SRIWEDARI BL	potong disini AYAPURA Nomor Pelayanan Tanggal Pelayanan Tgl. Selesai (perkiraan) 28-0 A OK O NO 7	2023.12.0 19-12-2023	(Pengesahan)
PELAYANAN Formulir Pelay BADAN PEND/ JI. Kabupaten II 2023.12.0137 Jenis Pelayanan NOP Nama Pemohon Alamat Pemohon Nama Wajib Pajak Alamat Objek Pajak Kecamatan	yanan Wajib Pajak BPHTE APATAN DAERAH KOTA Ji II No. 2 APO - JAYAPURA Jual Beli 82.71.003.006.024.01: NUR AYU F. KASTEL	potong disini AYAPURA Nomor Pelayanan Tanggal Pelayanan Tgl. Selesai (perkiraan)	2023.12.0 19-12-2023	(Pengesahan)
PELAYANAN Formulir Pelay BADAN PENDA JI. Kabupaten II 2023.12.0137 Jenis Pelayanan NOP Nama Pemohon Nama Pemohon Nama Pemohon Nama Vajib Pajak Kalurahan	Juel Bell 82.71.003.006.024.01: NUR AYU F. KASTEL PURI SRIWEDARI BLL KO. BTN HGB. 104 E. WAI MPURA WAI MEDICAL WAI	potong disini AYAPURA Nomor Pelayanan Tanggal Pelayanan Tgl. Selesai (perkiraan)	2023.12.0 19-12-2023	(Pengesahan)
PELAYANAN Formulir Pelay BADAN PEND JI. Kabupaten II 2023.12.0137 Jenis Pelayanan NOP Nama Pemohon Nama Pemohon Nama Wajib Pajak Kelurahan Kerangan Penerimaan Berkas FK KTP Pembeli yang be	Just Bell 82.71.003.006.024.01: NUR AYU F. KASTELL KO. BTN HGB. 104 E. WAI MHOROCK ABEPURA JUAL BELI	Penerbitan potong disini AYAPURA Nomor Pelayanan Tanggal Pelayanan Tgl. Selesai (perkiraan) 28-0 AOK O NO 7 A 12	2023.12.0 19-12-2023 19-12-2023	(Pengesahan)
PELAYANAN Formulir Pelay BADAN PENDI JI. Kabupaten II 2023.12.0137 Jenis Pelayanan NOP Nama Pemohon Alamat Pemohon Nama Wajib Pajak Alamat Objek Pajak Kecamatan Kecamatan Kecamatan Keterangan Penerimaan Berkas Fix ETP Pembeli yang be Fix Sertifikat Tanah	Just Bell 82.71.003.006.024.01: NUR AYU F. KASTEL PURI SRIWEDARI BL NUR AYU F. KASTEL KO. BTN HGB. 104 E. WAI MHOROCK ABEPURA JUAL BELI	potong disini AYAPURA Nomor Pelayanan Tanggal Pelayanan Tgl. Selesai (perkiraan) 28-0 A OK O NO 7 A 12	2023.12.0 19-12-2023 19-12-2023 19-12-2023	(Pengesahan)
PELAYANAN Formulir Pelay BADAN PENDI JI. Kabupaten II 2023.12.0137 Jenis Pelayanan NOP Nama Pemohon Alamat Pemohon Nama Wajib Pajak Alamat Objek Pajak Kecamatan Kecamatan Kecamatan Keterangan Penerimaan Berkas Fix ETP Pembeli yang be Fix Sertifikat Tanah	Juel Bell 82.71.003.006.024.01: NUR AYU F. KASTELL KO, BTN HGB. 104 E. WAI MHOROCK ABEPURA JUAL BELI 81.000.006.008.009.009.009.009.009.009.009.009.009	Penerbitan potong disini AYAPURA Nomor Pelayanan Tanggal Pelayanan Tgl. Selesai (perkiraan) 28-0 AOK O NO 7 A 12	2023.12.0 19-12-2023 19-12-2023 19-12-2023	(Pengesahan)
PELAYANAN Formulir Pelay BADAN PENDI/ JI. Kabupaten II 2023.12.0137 Jenis Pelayanan NOP Nama Pemohon Alamat Pemohon Alamat Pemohon Nama Wajib Pajak Kelurahan Ketaranatan Ketaranatan Ketaranatan Ketaranatan Ketaranatan Penerimaan Berkas Fic KTP Pembeli yang be Fic Serutifikat Tanah Surat Kussa dan pembe	Just Bell B2.71.003.006.024.01 B2.71.003.006.024.01 NUR AYU F. KASTELL KO. BTN HGB. 104 E. WAI MHOROCK ABEPURA JUAL BELI Briaku di menggunakan materai 6000 pembeli	Penerbitan potong disini sayapura Nomor Pelayanan Tanggal Pelayanan Tgl. Selesai (perkiraan) 28-0 A OK O NO 7 A 12 Fc SPPT PBB Tahun B Fc Kwintansi Jual - bel	2023.12.0 19-12-2023 19-12-2023 19-12-2023	(Pengesahan)
PELAYANAN Formulir Pelay BADAN PENDU JI. Kabupaten II 2023.12.0137 Jenis Pelayanan NOP Nama Pemohon Nama Pemohon Nama Pemohon Nama Pemohon Nama Vajib Pajak Kelurahan Kecamatan Kecamatan Kerangan Penerimaan Berkas Fc KTP Pembeli yang be Fc Sertifikat Tanah Surat Kusas dari pembe Lampran data penjual	Just Bell B2.71.003.006.024.01 B2.71.003.006.024.01 NUR AYU F. KASTELL KO. BTN HGB. 104 E. WAI MHOROCK ABEPURA JUAL BELI Briaku di menggunakan materai 6000 pembeli	Penerbitan potong disini sayapura Nomor Pelayanan Tanggal Pelayanan Tgl. Selesai (perkiraan) 28-0 A OK O NO 7 A 12 Fc SPPT PBB Tahun B Fc Kwintansi Jual - bel	2023.12.0 19-12-2023 19-12-2023 19-12-2023	(Pengesahan)

PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA TTD FRANS PEKEY

Diundangkan di Jayapura Pada tanggal 20 Desember 2023 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD

ROBBY KEPAS AWI, SE., MM PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19730118 200312 1 003

BERITA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2023 NOMOR 521

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA KEPALA BAGIAN HUKUM,

WIR, SH, MH

TPEMBINA TK. I 19740505 200312 2 0124